

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam bidang perpajakan, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan paradigma pemerintahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dalam peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan adanya perubahan secara bertahap bagi daerah, yaitu menuju pada kemandirian daerah. Penyelenggaraan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota telah memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya.

Kebijakan Otonomi Daerah merupakan suatu kebijakan untuk mendukung terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah hubungan masyarakat dunia yang semakin interdependensi. Seiring dengan “Reformasi Birokrasi” yang dijalankan pemerintah, baik pada tataran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk menjawab tuntutan yang semakin deras akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) dan desentralisasi kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam Undang-undang tersebut, pemerintah daerah diizinkan untuk memungut beberapa jenis pajak baru, di antaranya Pajak Sarang Burung Walet.

Pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar, oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dengan menggali potensi daerah.

Supaya penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan, maka pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah Kota Pekanbaru sebagai pelaksana pemerintah di daerah secara efektif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, *collocalia linchi*. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pada daerah Kota Pekanbaru pemungutan Pajak Sarang Burung Walet diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011. Pemungutan pajak dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, pemungutan yang terjadi di daerah kota Pekanbaru dalam hal Pajak Sarang Burung Walet, pemungutan yang terjadi belum sepenuhnya optimal karena masih ada Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang tidak mendaftarkan usahanya. Dikutip dari laman Harian Tribun News yang terbit pada Sabtu 19 Februari 2011,

“Saat ini, jumlah penangkaran burung walet yang ada di Pekanbaru, menurut Musa sebanyak 128 usaha. Data ini berdasarkan hasil pemantauan dari pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Sementara yang terdaftar di BPT baru 59 unit usaha.”

Sementara itu, dikutip dari laman Harian RiauPos yang terbit pada 6 Juli 2012,

“Sementara sampai tahun 2012 ini sudah bertambah sekitar 100 penangkaran walet dan tak ada satupun pengusaha yang melapor ke Distan. Keseratus penangkaran walet tersebut juga tak ada izin rekomendasi dari Distan. Berarti jumlah penangkaran walet di Pekanbaru sampai tahun 2012 total mencapai jumlah 600 penangkaran. Sedangkan yang legal hanya 59 penangkaran walet.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data yang telah didapati penulis dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah ada sebanyak 10 Badan / Pengusaha Sarang Burung Walet yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru hingga akhir Oktober 2016. Sebanyak 10 Badan/ Pengusaha Sarang Burung Walet tersebut diantaranya adalah:

Tabel 1.1 Nama-nama Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Pengelola Walet Huasiki	Jl. Sumber Sari Pekanbaru
2.	Pengelola Walet Sanjaya Nusantara	Jl. Pembangunan I Kulim Ujung Pekanbaru
3.	Pengelola Walet Sanjaya Nusantara	Jl. Damai Gg. Perkasa V Pekanbaru
4.	Pengelola Walet Handoko Nusantara	Jl. Satria Gg. Perkasa VIII Pekanbaru
5.	Pengelola Walet Aniati	Jl. Sempurna Gg. Sempurna Pekanbaru
6.	Pengelola Walet Salikun Djono	Jl. Kulim Ujung Blok K No. 4 Pekanbaru
7.	Pengelola Walet Salikun Djono	Jl. Kulim Komplek Pelangi Indah H/2 Pekanbaru
8.	Pengelola Walet Salikun Djono	Jl. Permata Satu Pekanbaru
9.	Pengelola Walet Salikun Djono	Jl. Riau Ujung Pekanbaru
10.	Pengelola Walet Salikun Djono	Jl. Ring Road Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016

Jadi ada sebanyak 10 badan / Pengusaha Sarang Burung Walet yang memiliki izin, hal ini membuktikan bahwa terdapat potensi dari Pajak Sarang Burung Walet yang ada di Kota Pekanbaru untuk memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet pada BAB III tentang Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 3 menjelaskan bahwa :

1. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
2. Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet.
3. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan. Dengan diberlakukannya Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru diharapkan mampu mendongkrak PAD Kota Pekanbaru dan membantu dalam pembangunan di Kota Pekanbaru.

Namun selama Pelaksanaannya dari tahun 2011 semenjak pengesahan Perda Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2011 hingga Tahun 2016 berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Realisasi dari Pajak Sarang Burung Walet tidak memberikan kontribusi yang besar. Hal ini dapat di lihat dalam tabel target dan realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru dari tahun 2014 hingga Oktober 2016.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	2014	Rp. 350.000.000,00	Rp. 19.935.000,00
2.	2015	Rp. 525.000.000,00	Rp. 20.535.000,00
3.	2016	Rp. 700.692.000,00	Rp. 17.520.000,00

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2016

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2014 target Pajak Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru sebesar Rp. 350.000.000,00 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 19.935.000,00. Pada tahun 2015 target Pajak Burung Walet Kota Pekanbaru sebesar Rp. 525.000.000,00 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 20.535.000,00. Pada tahun 2016 target Pajak Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru sebesar Rp. 700.692.000,00 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 17.520.000,00.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru sangat sedikit. Selain pemasukannya sebagai PAD, Pajak Sarang Burung Walet juga memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap pemasukan pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, selain itu pajak daerah juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan daerah diperlukannya dana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memadai maka pemerintah daerah harus mensiasati supaya kebutuhan rumah tangga daerah terpenuhi, oleh karena itu pemerintah daerah membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah, namun realisasi pajak daerah lebih rendah dari anggaran pajak daerah dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor internal yang meliputi kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah ataupun pengelolaan data yang ada. Adapun faktor eksternal yaitu berkurangnya daya beli masyarakat, banyak badan usaha yang bangkrut dan masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan realisasi pajak daerah kurang dari target yang sudah ditentukan. Hingga saat ini tingkat pencapaian pajak atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%. Besarnya penerimaan pajak daerah sangat bergantung kepada besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru sangat sedikit. Hal itu dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam hal pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, menurut Kepala Seksi Pajak Hotel, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu Bapak Iwandri menjelaskan kendala lain dari Pajak Sarang Burung Walet, diantaranya:

1. Sulitnya menemukan pemilik sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru. Tempat penangkaran sarang burung walet di Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah di ruko-ruko dimana hal ini membuat petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kesulitan untuk mengetahui penangkaran sarang burung walet.

2. Pajak Sarang Burung Walet ini perhitungan pajaknya dilimpahkan kepada wajib pajak itu sendiri (*self assessment system*). Pengusaha walet mulai dari memanen, menjual, menghitung hingga melaporkan pajaknya sendiri ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sehingga dibutuhkan kejujuran dari wajib Pajak Sarang Burung Walet dalam menghitung pajak yang akan di bayarkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
3. Penjualan sarang burung walet ini pasarnya tidak secara terbuka seperti pasar lain contohnya seperti sawit dan karet.
4. Kota Pekanbaru bukan merupakan daerah perairan dimana jumlah produktivitas sarang burung waletnya tidak lebih baik dengan daerah perairan seperti di Kabupaten Kepulauan Merati dan daerah perairan lainnya.

Pajak Sarang Burung Walet yang diharapkan untuk meningkatkan PAD Kota Pekanbaru ternyata masih sangat jauh dari target pungutan Pajak itu sendiri. Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pengusaha Sarang Burung Walet untuk membayar pajak.

Sementara itu Pengusaha Sarang Burung Walet menyampaikan bahwa usaha mereka belum menghasilkan, mengingat burung walet adalah hewan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alami dan tidak bisa dipastikan keberadaannya apalagi menetap di sarang yang telah dibuat oleh para pengusaha.

Terlihat jelas bahwa kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru masih belum maksimal. Hal itu dikarenakan adanya masalah-masalah ataupun kendala-kendala yang dihadapi baik oleh pihak pengusaha sarang burung walet dan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Berangkat dari fenomena dan data-data diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perhitungan dan penetapan target Pajak Sarang Burung Walet?
2. Apa usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mendata pengusaha sarang burung walet?
3. Bagaimanakah penegakan hukum (sanksi) kepada pengusaha sarang burung walet yang tidak membayar Pajak Sarang Burung Walet?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perhitungan dan penetapan target Pajak Sarang Burung Walet.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mendata pengusaha sarang burung walet.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum (sanksi) kepada pengusaha sarang burung walet yang tidak membayar Pajak Sarang Burung Walet.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori-teori yang di dapat oleh penulis dengan menghubungkannya dengan kenyataan praktek di lapangan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan penempatan pegawai.

3. Secara Akademis

Secara akademis penelitian penulis adalah sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi yang akan datang sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan pedoman.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori ini berisikan tentang landasan teori-teori atau konsep yang melandasi dari penelitian sehingga dapat mendukung dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan lokasi penelitian, peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian, susunan dan organisasi lokasi penelitian, uraian bagian dan bagian lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.